

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan meneliti tentang Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Nias untuk mengembangkan kepariwisataan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang terus dikembangkan untuk memperbesar pendapatan negara dan memperluas kesempatan usaha serta lapangan pekerjaan, mendorong pembangunan daerah sehingga tingkat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat meningkat. Sektor kepariwisataan dianggap mampu memberikan sumbangan pada penghasilan daerah dalam bentuk pajak maupun retribusi daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 285 ayat 1 (a) UU nomor 23 tahun 2014 yang mengatur sumber-sumber pendapatan Daerah yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Pajak Daerah
 - 2. Retribusi Daerah
 - 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- b) Pendapatan Transfer
- c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menargetkan pada tahun 2020 jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang. Hal ini didukung penambahan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Dalam pelaksanaannya, pembangunan kepariwisataan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, pada pasal 3 dijelaskan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia memiliki berbagai tempat wisata yang menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan. Provinsi Sumatera Utara juga merupakan salah satu provinsi yang mempunyai KSPN dan sebagai salah satu provinsi terbesar, provinsi ini merupakan salah satu tembok perekonomian nasional.

Kabupaten Nias sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang mempunyai potensi wisata menarik dan unik. Kabupaten Nias juga termasuk dalam 88 KSPN sesuai PP 50 Tahun 2011 dimana di dalamnya ditegaskan setiap daerah harus membuat Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparkab), dalam Riparkab tersebut, produk atau objek wisatanya berada di Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPKab). KSPKab dalam Riparkab ini ditergetkan akan menjadi Peraturan Daerah nantinya. Namun, sampai saat ini belum ada suatu Perda yang mengatur tentang pengelolaan Pariwisata di

Kabupaten Nias. Tanpa adanya Perda, pengelolaan pariwisata tidak berpedoman dan berlandaskan hukum.

Saat ini ada sekitar 58 objek wisata di Kabupaten Nias seperti tampak pada tabel berikut :

Tabel 1.1.1. Jumlah Objek Wisata di Kabupaten Nias

| Jenis Objek Wisata | Lokasi (Kecamatan) | Jumlah |
|---------------------------|--|---------------|
| Batu Megalit | Botomuzoi, Hiliserangkai, Ma'u, Gido, Sogae'adu, Idanogawo | 15 Lokasi |
| Tempat Rekreasi | Hiliduho, Hiliserangkai, Gido, Somolomolo, Sogae'adu, Ulugawo, Idanogawo, Bawolato | 20 Lokasi |
| Rumah Adat | Hiliduho, Botomuzoi, Hiliserangkai, Ma'u, Ulugawo, Bawolato | 18 Lokasi |
| Situs | Hiliserangkai | 2 Lokasi |
| JUMLAH | | 58 Lokasi |

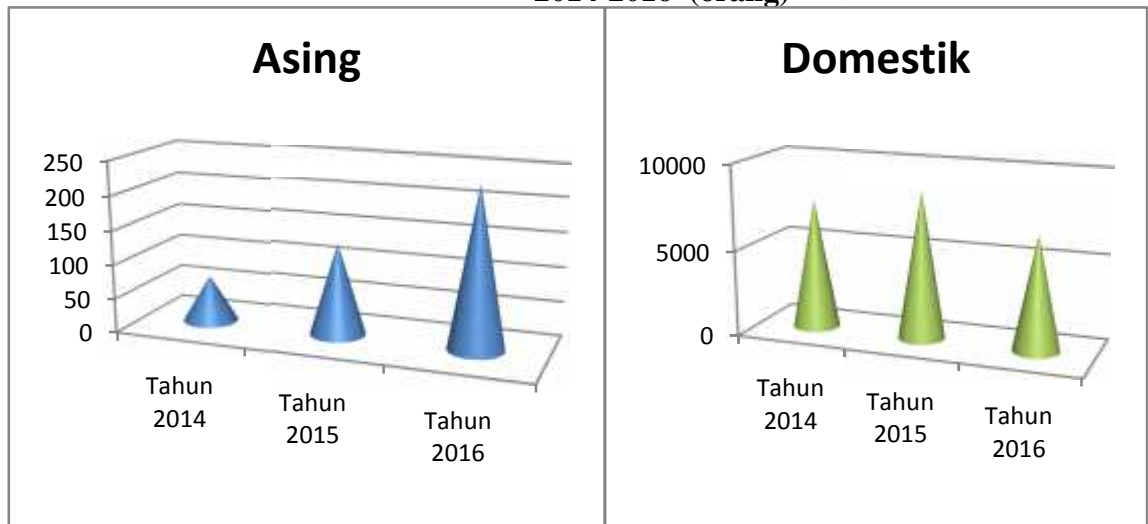
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Nias

Dengan banyaknya objek wisata tersebut maka seharusnya dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya PAD. Dengan adanya peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, maka masyarakat dapat memanfaatkan pariwisata sebagai lahan dalam meningkatkan perekonomian, sehingga sangat berpengaruh dalam peningkatan taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Nias secara umum. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Nias berfokus pada pengembangan 4 (empat) kawasan strategis objek wisata prioritas yaitu Somi, Bozihona, Onolimbu, dan Nalawo, yang biasa disingkat dengan Soziona. Kawasan tersebut meliputi kecamatan Gido, Sogae'adu, Idanogawo, dan Bawolato. Dari keempat objek wisata tersebut, diharapkan mampu memberikan

sumbangsih yang besar bagi PAD Kabupaten Nias serta peningkatan perekonomian masyarakat.

Objek pariwisata di Kabupaten Nias diperkirakan akan berkembang dan akan menjadi salah satu sumber andalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 1.1.2. Jumlah Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Nias Tahun 2014-2016 (orang)



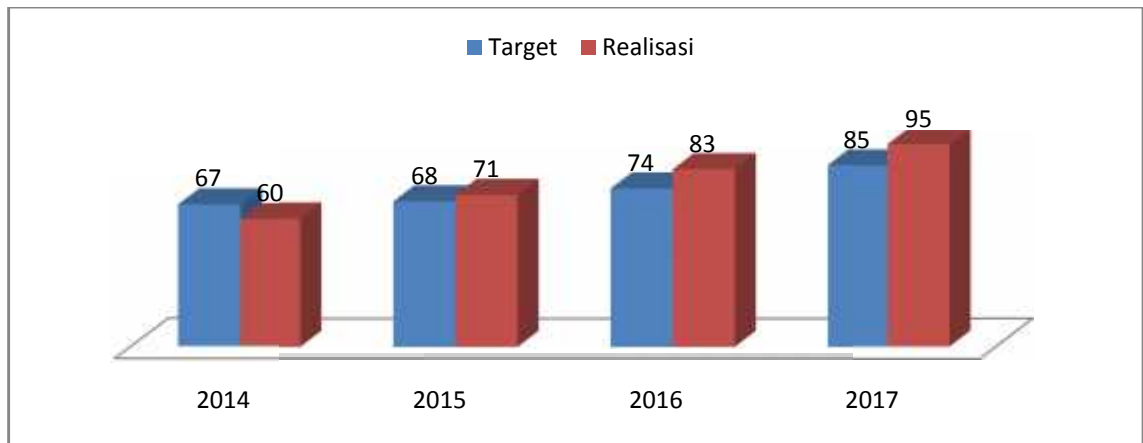
Sumber : BPS Kabupaten Nias 2017

Dari tabel 1.1.2 diatas, memperlihatkan bahwa data jumlah pengunjung objek wisata dari tahun ke tahun yang terus mengalami perubahan. Data yang terus meningkat ini merupakan salah satu bukti dari potensi perekonomian di Kabupaten Nias sebagai kekayaan pariwisata yang berbasis wisata alam dan wisata budaya.

Dari segi pendapatan, sektor Pariwisata Kabupaten Nias masih belum bisa memberikan sumbangsih yang besar bagi PAD bahkan belum mencapai target.

Sedangkan pada prinsipnya, target dari realisasi anggaran harusnya dapat tercapai dengan segala potensi yang ada.

Tabel 1.1.2. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota menurut Jenis Pendapatan (Milyar Rupiah)



Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias 2017

Hal ini dapat dilihat pada data PAD Kabupaten Nias di atas yang menunjukkan pertumbuhan dari tahun 2014 hingga 2017. Tetapi berdasarkan data per instansi, Persentase pemasukkan dari sektor pariwisata pada tahun 2017 masih di bawah 10% dan belum mencapai target.

Tabel 1.1.3. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017 dari sektor Pariwisata (Rupiah)



Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias

Potensi pariwisata di Kabupaten Nias sangat besar, namun dengan pengelolaan yang dilakukan selama ini, pariwisata tidak mampu memberikan sumbangsih yang besar bagi PAD.

Dari penelitian *Febrianti Dwi Cahya Nurhadi,dkk* tentang *Strategi Pengembangan Pariwisata Oleh Pemerintah Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto)* pada tahun 2014, menunjukkan bahwa Kondisi dan Potensi Objek Pariwisata Kabupaten Nias tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Mojokerto di Jawa Timur. Adapun strategi yang dilakukan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Mojokerto terkait dengan 3 hal yaitu *Pertama*, Pengembangan objek wisata. Pengembangan objek wisata dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana, pembenahan objek wisata, serta membentuk badan promosi daerah. *Kedua*, Promosi Wisata. Strategi terkait promosi adalah dengan melakukan berbagai event seperti “raki-raki”, “gus yuk” dan tidak kalah pentingnya menggunakan media cetak maupun elektronik. *Ketiga* adalah Pembinaan usaha pariwisata. Strategi ini dilakukan dengan bekerjasama dengan badan/organisasi yang berkaitan dengan pariwisata seperti pemilik Penginapan (24 unit penginapan biasa dan 2 unit penginapan berbintang), Rumah Makan (23 Unit), fasilitas transportasi (angkutan pedesaan, ojek, becak dan kuda), dan Toko *Souvenir* sehingga sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan dapat tersedia dengan baik. Jaminan terhadap adanya *public utilities* seperti jaringan komunikasi, listrik dan air juga harus tersedia. Adapun yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan strategi pengembangan Pariwisata di

Kabupaten Mojokerto adalah memerlukan biaya transportasi yang banyak karena Lokasi Objek wisata rata-rata berada diatas gunung, adanya status kepemilikan lahan dengan pihak lain, kurangnya kerjasama dengan pihak ketiga, dana yang terbatas serta belum adanya Perda yang terkait dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Mojokerto.

.Keberadaan berbagai objek wisata di Kabupaten Nias akan kurang berdayaguna jika pihak Pemerintah Kabupaten Nias tidak mampu menemukan strategi yang tepat dalam meningkatkan potensi pariwisata yang ada. Diperlukan kajian lebih mengenai strategi pengembangan pariwisata yang telah dilakukan di Kabupaten Nias. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Nias dalam upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus di Dinas Pariwisata Kabupaten Nias) ”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana Strategi Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Nias dalam upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah

1.3. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Strategi Pengembangan Kepariwisataaan Kabupaten Nias dalam upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah

1.4. Manfaat

1. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah kedalam praktik nyata.
2. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Nias, diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam hal Strategi Peningkatan Kepariwisataaan.
3. Bagi Masyarakat Kabupaten Nias, diharapkan mampu menjadi sumber informasi serta referensi terkait pengembangan dan pengelolaan objek pariwisata.
4. Bagi Akademik, diharapkan menjadi sumber dan bahan masukan bagi penelitian lain untuk menggali dan melakukan eksperimen tentang Pengembangan Kepariwisataaan.
5. Bagi Universitas HKBP Nommensen, diharapkan dapat memperkaya ragam penelitian di Bidang Ilmu Administrasi Negara.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Konsep Teori

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, defenisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Sama halnya dalam penelitian ini, harus ada landasan teori yang mendasar dan sistematis sebagai acuan dalam melakukan proses tindakan pengkajian dari berbagai permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, didalam penelitian ini semua landasan teori yang dipergunakan secara teliti akan dijadikan landasan atau kekuatan teoritis dalam mengkaji masalah serta cara penanggulangannya, setelah diuji kebenarannya. Sehingga pada akhirnya penelitian ini dapat diterima sebagai suatu karya ilmiah dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis akan memaparkan beberapa teori, pendapat dan gagasan yang akan menjadi titik tolak landasan berpikir dalam penelitian ini.

2.2. Konsep Strategi

Istilah Strategi berasal dari kata Yunani *Strategria* (Stratus=Militer, Danag=Pemimpin), yang artinya seni atau ilmu menjadi seorang jenderal. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dulu yang sering diwarnai perang, dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang agar dapat selalu memenangkan perang. Strategi juga bisa diartikan sebagai suatu rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah

tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi militer didasarkan pada pemahaman akan kekuatan dan penempatan posisi lawan, karakteristik fisik medan perang, kekuatan dan karakter sumber daya yang tersedia, sikap orang-orang yang menempati teritorial tertentu, serta antisipasi terhadap setiap perubahan yang mungkin terjadi.

Ada berbagai macam pengertian strategi. Menurut *Chandler* dalam buku Husein Umar “strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program ini tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya”¹. Sedangkan *Porter* berpendapat bahwa “strategi adalah alat-alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing”.²

Pakar strategi *Hamel dan Prahalad*, yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Mereka berdua mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut.

Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi...³

Konsep strategi militer seringkali diadaptasi dan ditetapkan dalam dunia bisnis, misalnya konsep *Sun Tzu, Hannibal, dan Carl Von Clausewitz*. Dalam konteks bisnis, strategik menggambarkan arah bisnis yang mengikuti lingkungan yang dipilih dan merupakan pedoman untuk mengalokasikan sumber daya dan usaha suatu organisasi. Menurut *Jain*, Setiap organisasi membutuhkan strategi manakala menghadapi situasi berikut :

¹ Husein Umar, *Desain Peneliti Manajemen Strategik*, Jakarta: Raja Pera,2010, hal 16

²*Ibid.* Hal 16

³Husein Umar,*Lok.Cit*, hal 17

1. Sumber Daya yang dimiliki terbatas. Ada ketidakpastian mengenai kekuatan bersaing organisasi
2. Komitmen terhadap sumber daya tidak dapat diubah lagi
3. Keputusan-keputusan harus dikoordinasikan antara bagian sepanjang waktu
4. Ada ketidakpastian mengenai pengendalian inisiatif⁴

Stoner, Freeman dan Gilbert, Jr mengemukakan konsep strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu “(1) dari perspektif strategi dapat didefinisikan berdasarkan dua perspektif yang berbeda, yaitu (1) dari perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan (*intends to do*), dan (2) dari perspektif apa yang organisasi akhirnya lakukan (*eventually does*)”⁵.

Berdasarkan perspektif yang pertama, strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan mengimplementasikan misinya. Makna yang terkandung dari strategi ini adalah para manager memainkan peran aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Dalam lingkungan yang turbulen dan selalu mengalami perubahan, pandangan ini lebih banyak diterapkan.

Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapa atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

⁴Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1995, hal 3

⁵*Ibid*, hal 3

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Membuat strategi bukan semata-mata tugas eksekutif puncak. Manajer tingkat menengah dan manajer tingkat bawah pun harus sejauh mungkin dilibatkan dalam proses perencanaan strategis. Menurut *David*,

“penting untuk diperhatikan bahwa semua orang yang bertanggungjawab untuk perencanaan strategis di berbagai tingkatan tersebut idealnya berpartisipasi dan memahami strategi di tingkat organisasional yang lain guna membantu memastikan koordinasi, fasilitas dan komitmen disamping menghindari ketidakkonsistensian, ketidakefektifan, dan kesalahpahaman”.⁶

Dari pengertian diatas, dapat dipastikan bahwa setiap manajer dalam setiap jenis harus memahami dan mendukung setiap strategi secara keseluruhan.

2.3. Pariwisata

2.3.1. Pengertian dan Konsep Pariwisata

Konsep pariwisata mengandung kata kunci “perjalanan” (tour) yang dilakukan seseorang, yang melancong demi kesenangan untuk sementara waktu, bukan untuk menetap atau bekerja. Pariwisata adalah suatu gejala yang sangat kompleks di dalam masyarakat, yang oleh karena itu pariwisata kini berkembang menjadi suatu subjek pengetahuan yang pantas dibahas secara ilmiah.

⁶ Fred R. David, *Manajemen Strategis, Terjemahan Dono Sunardi* Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal 252

Nyoman S. Pendet dalam bukunya *Ilmu Pariwisata* memberikan definisi mengenai pariwisata yaitu “salah satu jenis industri baru mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta mensitumulus sektor-sektor produktivitas lainnya⁷”.*Salah Wahab* menyatakan bahwa

pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya. Sebagai sektor yang kompleks yang meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata⁸.

Sedangkan menurut *Oka A. Yoeti*

pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (bussines) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam⁹.

Berdasarkan pendapat-pendapat dan para ahli tersebut maka penulis dapat memberikan pengertian pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari satu tempat ketempat lain yang mempunyai obyek dan daya tarik wisata untuk dapat dinikmati sebagai suatu rekreasi atau hiburan mendapatkan kepuasan lahir dan batin.

Sesuai dengan intruksi presiden nomor 9 tahun 1969 bahwa tujuan dari Pengembangan kepariwistaan adalah sebagai berikut :

⁷Nyoman S Pendet, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1999 Hal 35

⁸*Ibid*

⁹Oka A. Yoeti, *Pemasaran Pariwisata*, Bandung: Angkasa, 1990, hal 109

- Meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan Negara serta masyarakat pada umumnya. Memperluas kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri sampingan lainnya.
- Memperkenalkan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia.
- Meningkatkan persaudaraan atau persahabatan nasional dan internasional.

Selain itu manfaat yang didapat dari bidang kepariwisataan adalah Pariwisata bisa menghasilkan devisa bagi Negara sehingga dapat meningkatkan perekonomian suatu Negara. Disisi lain Pariwisata membawa sebuah pemahaman dan pengertian antar budaya dengancara lewat interaksi wisatawan dengan masyarakat lokal tempat daerah wisata tersebut berada. Sehingga dari segi interaksi inilah para wisatawan dapat mengenal dan juga menghargai budaya masyarakat setempat dan juga latar belakang kebudayaan lokal yang dianut oleh masyarakat tersebut.

2.3.2. Objek Wisata

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus dirancang dan di bangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek wisata harus di rancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang cocok dengan daerah wisata tersebut.

Dalam melakukan perencanaan pengembangan pariwisata perlu dilihat jenis-jenis pariwisata yang berpotensi dan mempunyai kemungkinan untuk

dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Hal tersebut dipandang perlu karena akan sangat berpengaruh terhadap motivasi dari wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata pada objek wisata tersebut.

Menurut *Nyoman S. Pandit*, Objek pariwisata dapat digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu :

1)Wisata Budaya

Merupakan perjalanan wisata atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan seseorang dengan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka.

2) Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan dengan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari di mana ia tinggal demi kepentingan beristirahat baginya dalam arti jasmani dan rohani dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang memiliki iklim udara menyehatkan atau tempat yang memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

3) Wisata Olah Raga

Wisatawan yang melakukan perjalanan dengan tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam peserta olahraga disuatu tempat atau Negara seperti Asian Games, Olympiade, Thomas Cup, Uber Cup dan lain-lain. Bisa saja olah raga memancing, berburu, berenang.

4) Wisata Komersial

Dalam jenis ini termasuk perjalanan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.

5) Wisata Industri

Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dimana terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Misalnya, rombongan pelajar yang mengunjungi industri tekstil.

6) Wisata Politik

Perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian aktif dalam peristiwa kegiatan politik. Misalnya, ulang tahun 17 Agustus di Jakarta, Perayaan 10 Oktober di Moskow, Penobatan Ratu Inggris, Perayaan Kemerdekaan, Kongres atau konvensi politik yang disertai dengan darmawisata.

7) Wisata Konvensi

Perjalanan yang dilakukan untuk melakukan konvensi atau konferensi. Misalnya APEC, KTT non Blok.

8) Wisata Sosial

Merupakan pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah untuk mengadakan perjalanan seperti kaum buruh, pemuda, pelajar atau mahasiswa, petani dan sebagainya.

9) Wisata Pertanian

Merupakan pengorganisasian perjalanan yang dilakukan ke proyek-proyek pertanian, perkebunan, ladang pembibitan dan sebagainya dimana wisatawan rombongan dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk tujuan studi maupun melihat-lihat keliling sambil menikmati segarnya tanaman beraneka ragam warna dan suburnya pembibitan di tempat yang dikunjunginya.

10) Wisata Maritim (Marina) atau Bahari

Wisata yang dikaitkan dengan kegiatan olah raga di air, lebih-lebih danau, bengawan, teluk atau laut. Seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar, balapan mendayung dan lainnya.

11) Wisata Cagar Alam

Wisata ini biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, tanaman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya.

12) Wisata Buru

Wisata untuk buru, ditempat atau hutan yang telah ditetapkan pemerintah Negara yang bersangkutan sebagai daerah perburuan, seperti di Baluran, Jawa Timur untuk menembak babi hutan atau banteng.

13) Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini dikaitkan dengan agama, sejarah, adat-istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Ini banyak dilakukan oleh rombongan atau perorangan ketempat-tempat suci, ke makam-makam orang besar, bukit atau gunung yang dianggap keramat, tempat pemakaman tokoh atau pimpinan yang dianggap legenda. Contoh makam Bung Karno di Blitar, Makam Wali Songo, tempat ibadah seperti di Candi Borobudur, Pura Besakih di Bali, Sendang Sono di Jawa Tengah dan sebagainya.

14) Wisata Bulan Madu

Suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan-pasangan, pengantin baru, yang sedang berbulan madu dengan fasilitas-fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.¹⁰

¹⁰Nyoman S. Pandit, *Op.Cit*, Hal 38-43

2.3.3. Pengembangan Objek Wisata

Pengembangan daya tarik wisata merupakan usaha untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi daya tarik wisata berdasarkan potensi dan sumber daya yang dimilikinya. Ada 3 (tiga) persyaratan dalam mengembangkan daya tarik wisata tersebut, yaitu:

1. Daya tarik wisata ini harus menarik disaksikan maupun dipelajari.
2. Mempunyai kekhususan, berbeda dengan daya tarik lain (ciri khas).
3. Tersedianya fasilitas bagi wisatawan.

Pengembangan daya tarik wisata mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Pengembangan produk baru di mana usaha yang dilakukan secara searah dan berencana.
2. Untuk memperbaiki produk yang sedang berjalan.
3. Untuk menambah jenis produk yang dihasilkan atau dipasarkan.

Persyaratan produk tersebut dapat dikatakan telah berhasil dikembangkan adalah produk tersebut dapat dijual kepada konsumen dalam hal ini wisatawan. Selain dapat dijual dan harus memenuhi syarat pengembangan produk, suatu produk pariwisata juga harus memiliki gaya atau karakteristik produk (product style) yang baik. Selain itu, dalam pengembangan daya tarik wisata juga harus mencakup 3 (tiga) hal menurut *Yoeti*, yaitu:

- 1) Pembinaan produk wisata artinya usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan pelayanan melalui berbagai unsur pokok produksi wisata seperti jasa penginapan, angkutan wisata, hiburan dan melakukan perjalanan ke obyek wisata.

2) Pembinaan masyarakat wisata artinya dalam pengembangan daya tarik wisata sangat diperlukan keterlibatan masyarakat setempat dalam pemeliharaan dan pelestarian serta keberlanjutan obyek tersebut.

3) Pemasaran terpadu artinya pemasaran daya tarik wisata kepada wisatawan juga memakai unsur-unsur pemasaran secara terpadu yang meliputi : produk yang dipasarkan, promosi yang tepat, pasar dan harga yang terjangkau.

Kemudian untuk menilai keberhasilan dalam pengembangan obyek dan daya tarik wisata harus mencakup berbagai kriteria kelayakan, yaitu dengan melakukan studi kelayakan terkait kelayakan finansial, kelayakan sosial ekonomi regional, kelayakan teknis, dan kelayakan lingkungan (AMDAL).

Selanjutnya *Yoeti* berpendapat bahwa Dalam pengembangan pariwisata ini ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan yaitu:

1) Wisatawan (Tourist)

Harus diketahui karakteristik dari wisatawan, dari negara mana mereka datang, usia, hobi, dan pada musim apa mereka melakukan perjalanan.

2) Transportasi

Harus dilakukan penelitian bagaimana fasilitas transportasi yang tersedia untuk membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata yang dituju.

3) Atraksi/obyek wisata

Bagaimana obyek wisata dan atraksi yang akan dijual, apakah memenuhi tiga syarat berikut, apa yang dapat dilihat, apa yang dilakukan dan apa yang dapat dibeli di DTW yang dikunjungi.

4) Fasilitas pelayanan

Fasilitas apa saja yang tersedia di DTW tersebut, bagaimana akomodasi perhotelan yang ada, restoran, pelayanan umum seperti Bank/money changers, kantor pos, telepon/teleks di DTW yang akan dikunjungi wisatawan.

5) Informasi dan promosi

Diperlukan publikasi atau promosi, kapan iklan dipasang, kemana leaflets/ brosur disebarakan sehingga calon wisatawan mengetahui tiap paket wisata dan wisatawan cepat mengambil keputusan.¹¹

Pengembangan pariwisata ini tidak lepas dari peran organisasi kepariwisataan pemerintah, seperti Dinas Pariwisata yang mempunyai tugas dan wewenang serta kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan aset negara yang berupa obyek wisata. Sebagaimana suatu organisasi yang diberi wewenang dalam pengembangan pariwisata di wilayahnya, ia harus menjalankan kebijakan yang paling menguntungkan bagi daerah dan wilayahnya, karena fungsi dan tugas dari organisasi pariwisata pada umumnya :

- 1) Berusaha memberikan kepuasan kepada wisatawan kedaerahannya dengan segala fasilitas dan potensi yang dimilikinya.
- 2) Melakukan koordinasi diantara bermacam-macam usaha, lembaga, instansi dan jawatan yang ada dan bertujuan untuk mengembangkan industri pariwisata.
- 3) Mengusahakan memasyarakatkan pengertian pariwisata pada orang banyak, sehingga mereka mengetahui untung dan ruginya bila pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
- 4) Mengadakan program riset yang bertujuan untuk memperbaiki produk wisata dan pengembangan produk-produk baru guna dapat menguasai pasaran di waktu-waktu yang akan datang.
- 5) Menyediakan semua perlengkapan dan fasilitas untuk kegiatan pemasaran pariwisata, sehingga dapat diatur strategi pemasaran keseluruhan wilayah.
- 6) Merumuskan kebijakan tentang pengembangan kepariwisataan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan secara teratur dan berencana.¹²

Oleh karena itu peranan organisasi kepariwisataan pemerintah salah satunya adalah terkait pengembangan pariwisata di suatu daerah. Selain itu perlunya disiapkan beberapa hal, seperti sumber daya yang ada, mempersiapkan

¹¹Oka A. Yoeti, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 1997, hal 2

¹²Ibid, hal 48

masyarakatnya serta kesiapan sarana penunjanglainnya, karena bagaimanapun juga wisatawan menghendaki pelayananyang memuaskan.

2.4. Keuangan Daerah

Segala kekayaan daerah yang belum dimiliki dan atau telah dikuasai oleh negara atau daerah berpotensi menjadi sumber keuangan daerah. Menurut *Halim* “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.”¹³

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimulai dalam penjelasan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah tersebut meliputi :

- 1) Hak menarik pajak daerah,
- 2) Hak untuk menarik retribusi daerah,
- 3) Hak mengadakan pinjaman, dan
- 4) Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.

Sedangkan kewajiban daerah meliputi :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,

¹³ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta Salemba Empat, 2002 hal23.

- 2) Memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan pengertian diatas, pada prinsipnya keuangan daerah mengandung unsur pokok yaitu hak daerah, kewajiban daerah dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintahan daerah mengisi kas daerah. Kewajiban daerah juga merupakan bagian pelaksanaan tugas-tugas pemerintah pusat sesuai dengan UUD 1945.

2.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah 3 bagian yaitu :

1. Pajak Asli Daerah bersumber dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah

- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.5.1. Pajak Daerah

Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian pajak menurut *Rochmat Sumitro* dalam *Darise* "Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) langsung yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum"¹⁴.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam

¹⁴Darise, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: PT. Indeks, 2006, hal 44

APBD. Didalam segi kewenangan pemungutan pajak atas objek di daerah, dibagi atas dua hal yaitu:

1. Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi

Pajak provinsi didalam kewenangan pungutannya terdapat pada pemerintah daerah provinsi. Didalam pajak provinsi jenis pajak tersebut ada beberapa jenis berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000, tentang Pajak Daerah adalah :

(a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

(b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

(c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

(d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/kota

Pajak Kabupaten/kota kewenangan pemungutan ada pada pemerintah daerah kabupaten atau kota . Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah ditetapkan sebanyak tujuh, yaitu:

(a) Pajak Hotel

(b) Pajak Restoran (c) Pajak Hiburan (d) Pajak Reklame

(e) Pajak Penerangan Jalan

(f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C (g) Pajak Parkir

2.5.2. Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama

lan, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*.

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. *Ahmad Yani* juga berpendapat bahwa “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”¹⁵

Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 1997 disebutkan bahwa retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Jasa tertentu atau jasa khusus tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jasa umum, antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pemakaman, penggantian biaya cetak KTP dan Akta

¹⁵ Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Jakarta:PT.Rajawali Pers 2002, hal 55

pencatatan sipil. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan umum pemerintahan.

2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh penda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta. Jasa usaha, antara lain penyewaan aset yang dimiliki/diakui oleh pemerintah daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil, penjualan bibit, retribusi pasar grosir, retribusi penginapan.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggunaan sumber daya alambarang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengadilan, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain izin mendirikan bangunan, izin penggunaan tanah, retribusi izin trayek, retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

4. Retribusi Lain-lain, sesuai dengan Undang-undang No.34 tahun 2000 telah ditetapkan retribusi jasa umum, jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Sesuai dengan undang-undang tersebut daerah juga diberikan kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi daerah lainnya yang dipandang sesuai dengan daerahnya, apakah ada potensi yang lain yang dapat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai retribusi.

2.5.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat (3) menyebutkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milikdaerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milikpemerintah/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta ataukelompok usaha masyarakat.

2.5.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

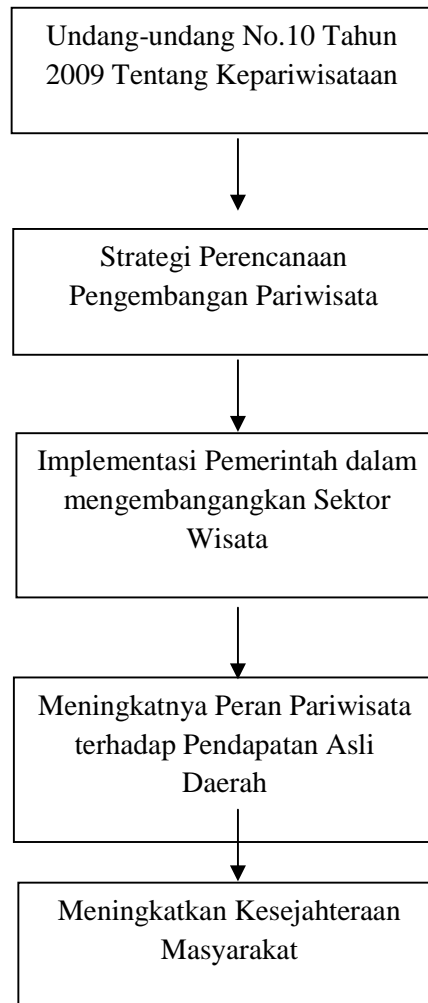
Lain-lain pendapatan yang sah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat (4) dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.

5. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan.
6. Pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
7. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
8. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
9. Pendapatan denda pajak.
10. Pendapatan denda retribusi.
11. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
12. Pendapatan dari pengembalian.
13. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
14. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
15. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

2.6. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir suatu penelitian dan penjelasan pemahaman pokok tentang permasalahan yang hendak diteliti. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Keterangan :

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan landasan hukum bagi semua pengelolaan pariwisata di Indonesia. Undang-undang ini menjamin agar dapat terselenggaranya semua pengelolaan pariwisata. Pemerintah

Daerah Kabupaten sebagai daerah otonomi mempunyai strategi perencanaan dalam pengembangan pariwisata berdasarkan UU No.10 Tahun 2009. Dari strategi tersebut kemudian akan di implementasikan. Implementasi Strategi Pengembangan Pariwisata akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah. Semakin baik strategi perencanaan pariwisata maka semakin besar sumbangsinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah yang besar, maka hal itu akan memberikan keleluasan bagi pemerintah dalam melakukan pembangunan di Daerah. Pembangunan nantinya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Bentuk Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut *Creswell*, “Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”¹⁶.

Pendapat di atas pada dasarnya sesuai dengan judul pada penelitian ini. Penelitian ini lebih mengarah kepada keadaan sosial, di mana fenomena dan realitasnya berkembang luas. Keabsahan data akan didapatkan seiring dengan pengamatan yang dilakukan dan disesuaikan dengan pengembangan teori yang ada.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Nias yang beralamat di Jl.Pancasila No.27, Hiliweto Gido, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, Sumatera Utara.

Adapun alasan mengambil lokasi penelitian di dinas tersebut adalah karena Dinas tersebut merupakan lembaga pemerintah yang menangani permasalahan

¹⁶Jhon W Creswell. Research Design Pendekatan Kualitatif kuantitatif dan Mixed, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 4

pengelolaan pariwisata, termasuk di dalamnya strategi pengembangan objek wisata di Kabupaten Nias sehingga peneliti dapat mendapat informasi terkait bahan penelitian

3.3. Informan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan populasi dan sampel melainkan informan penelitian dikarenakan bentuk penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Untuk menentukan informan yang akan digunakan dalam peneliti, peneliti menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling dimana teknik pengambilan informan sebagai sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu itu adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi syarat. Yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara ataupun pejabat Non Formal di Dinas Pariwisata Kabupaten Nias.

Oleh karena itu, informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Informan Kunci, merupakan orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nias.
- b) Informan Utama, dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan utama adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi

Pariwisata, Kepala Bidang Promosi dan Pemasaran, Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.

3.4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan untuk memperoleh suatu informasi atau data tentang strategi pengembangan Pariwisata di Kabupaten Nias. Berbagai sumber informasi atau sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Teknik pengumpulan data primer digunakan dengan metode wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya-jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, majalah ilmiah dan dokumen yang terkait dengan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Nias. Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan :

- Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

- Penelitian Kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui literature dan sumber-sumber bacaan yang berkenaan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang di tetapkan.

3.5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip wawancara men-*scanning* materi, menetik data lapangan, atau memilah-milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- b. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sense* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan makna secara keseluruhan.

- c. Menganalisis lebih detail dengan meng-*coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (atau paragraf-paragraf).
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.
- e. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- f. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “Pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan

